

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan dan analisis yang telah dilakukan, maka hasil penelitian analisis peningkatan kinerja pengelolaan keuangan desa di kabupaten serdang bedagai perspektif *Maqashid syariah* dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Masalah yang dihadapi oleh pemerintah desa Kabupaten Serdang Bedagai dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan desa berdasarkan hasil kesepakatan responden terbagi tiga masalah dengan tingkat prioritas sebagai berikut prioritas pertama adalah masalah sumber daya manusia, prioritas kedua masalah partisipasi Masyarakat dan prioritas ketiga badan permusyawaratan desa. Tingkat kesepakatan (*rater agreement*) responden atas permasalahan tersebut tinggi yaitu sebesar 0,43 dalam menentukan prioritas utama permasalahan peningkatan kinerja pengelolaan keuangan desa pemerintah desa Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Untuk mengatasi permasalahan yang ada maka, diputuskan solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan peningkatan kinerja pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Serdang Bedagai. Prioritas utama yang di dapati untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah solusi sumber daya manusia, diikuti solusi partisipasi Masyarakat dan solusi badan permusyawaratan desa. Tingkat kesepakatan responden (*rater agreement*) sedang atas menentukan solusi permasalahan peningkatan kinerja pengelolaan keuangan desa di pemerintah desa Kabupaten Serdang Bedagai sebesar 0,23.
3. Alternatif yang paling prioritas dalam penentuan strategi peningkatan kinerja pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Serdang Bedagai adalah dengan melaksanakan strategi penguatan kapasitas aparatur desa, diikuti regulasi perekrutan dengan melibatkan pihak ketiga, membangun komitmen dan terprogramnya pelatihan dan sosialisasi secara berkesinambungan. Berdasarkan hasil tingkat kesepakatan responden (*rater agreement*) sangat rendah sebesar 0,02 dalam menentukan prioritas utama dalam strategi mengatasi permasalahan peningkatan kinerja pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Serdang Bedagai.

B. Saran

1. Kepada pemerintah desa untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan desa diperlukan adanya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, baik aparatur desa maupun badan permusyawaratan desa. Kapasitas sumber daya manusia dapat dilaksanakan dalam bentuk pelatihan maupun non pelatihan dan disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dari masing-masing sumber daya manusia. Sehingga pengembangan kapasitas sumber daya manusia yang telah dilaksanakan tepat sasaran. Contohnya sebelum melakukan pelatihan dilakukan pemetaan kepada masing-masing sumber daya manusia terkait permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan desa, sehingga pelaksanaan pelatihan tepat sasaran
2. Kepada pemerintah agar sumber daya manusia yang dipilih sesuai dengan kompetensinya dan transparan pemilihan sumber daya manusia melibatkan pihak ketiga. Pemerintah dapat melibatkan perguruan tinggi dalam melaksanakan pemilihan aparatur desa.
3. Kepada pemerintah agar tetap terus meningkatkan sosialisasi pengelolaan keuangan desa kepada Masyarakat desa. Sehingga Masyarakat desa dapat berpartisipasi pada pengelolaan keuangan desa. Sosialisasi dapat dilakukan dengan mengadakan diskusi terbuka untuk memberikan kesempatan warga desa berbicara tentang pengelolaan keuangan desa, dan bertukar pandangan; mendistribusikan bahan sosialisasi seperti pamflet dan brosur yang berisi informasi tentang pengelolaan keuangan desa; dan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan penjelasan mendalam tentang pengelolaan keuangan desa.